Pengaruh Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah

Suci Nasehati Sunaningsih¹, Agustina Prativi Nugraheni²

Program Studi S1 Akuntansi¹, Program Studi S1 Akuntansi²

Fakultas Ekonomi¹, Fakultas Ekonomi²

Universitas Tidar¹, Universitas Tidar²

sucinasehati@untidar.ac.id¹, devi.agustina@untidar.ac.id²

Received: September 18, 2022. **Revised:** October 15, 2022. **Accepted:** October 28, 2022.

Issue Period: Vol.6 No.4 (2022), Pp. 894-903

Abstrak: Otonomi daerah memberikan konsekuensi kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu indikator kemandirian keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, jumlah wisatawan, dan belanja modal terhadap PAD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2020. Tahun 2020 merupakan periode awal terjadinya bencana pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada perekonomian nasional. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data meliputi: analisis deskriptif, penentuan model estimasi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Seluruh variabel dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap PAD. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah perlu mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja modal agar berguna untuk peningkatan PAD.

Kata kunci: investasi, jumlah wisatawan, belanja modal, Pendapatan Asli Daerah

Abstract: Regional autonomy has consequences for local governments to achieve regional independence in governance affairs. An indicator of regional financial independence is Original Local Government Revenue (OLGR). This study aims to analyze the effect of investment, number of visitors, and capital expenditures on OLGR in Regency/City Governments in Central Java for the period 2017-2020. The year 2020 was the initial period of the Covid-19 pandemic which had a huge impact on national economy. The sample in this study consisted of 29 regencies and 6 cities in Central Java Province. Data analysis methods include: descriptive analysis, estimate the estimation model, classical assumption test, and hypothesis testing. The results showed that the investment and number of visitors has no positive and significant effect on OLGR, while the capital expenditure has a positive and significant effect on PAD. All variables in this study simultaneously affect OLGR. By the results of this study, Regency/City Governments in Central Java Province could be optimizing the effectiveness and efficiency of using capital expenditure so it can be useful for increasing OLGR.

Keywords: investment, number of visitors, capital expenditures, Original Local Government Revenue

DOI: 10.52362/jisamar.v6i4.949

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan daerah merupakan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang mulai dilaksanakan sejak era Reformasi melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal yang secara resmi dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 lalu menyebabkan adanya pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya pada segala bidang, kecuali dalam bidang politik luar negeri, moneter, pertahanan dan keamanan negara, agama, yustisi, dan urusan pemerintahan yang berskala internasional. Pelimpahan tersebut juga termasuk pada penyerahan fungsi pengeluaran dan pendapatan sesuai dengan asas money follow function serta adanya mekanisme transfer dari pusat untuk mengurangi ketimpangan antar daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah mengandung konsekuensi tuntutan kepada setiap daerah otonom untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Salah satu upaya yang harus dilakukan ialah dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah melalui optimalisasi kemampuan dan potensi daerah. Tingkat kemandirian ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan kemampuan daerah membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi [1]. Lebih lanjut, kemandirian ekonomi merujuk pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya alam, manusia, serta keuangan yang dimilikinya secara optimal [2]. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian daerah karena merepresentasikan kemampuan daerah dalam mengelola potensi daerahnya.

Upaya penguatan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi belanja negara untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun nyatanya berisiko pada semakin tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD adalah sebesar 80,1% sedangkan kontribusi PAD hanya sekitar 12,87% dan yang lebih parah terjadi pada level pemerintah daerah kabupaten/kota [3]. Situasi ini berlangsung sampai dengan tahun 2021 yang mana keadaan ekonomi Indonesia semakin diperparah dengan adanya bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi pada Maret 2020. Namun demikian, Pemerintah daerah baik level provinsi maupun kabupaten/kota terus berinovasi dan meningkatkan target kinerja di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi, industri, dan pariwisata. Salah satu pemerintah daerah yang selalu berinovasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya melalui sektor ekonomi maupun pariwisata adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, 576 kecamatan yang meliputi 7.809 desa dan 753 kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 36.742.501 jiwa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa proyek prioritas unggulan diantaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kendal dengan luas 4.500 hektare, Kawasan Industri (KI) di Batang, Cilacap, Demak, Kota Semarang, dan Brebes, serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Borobudur, Kabupaten Magelang. Dengan demikian, dilihat dari aspek geografis (topologi, abiotik, biotik) maupun aspek sosial (ekonomi, budaya, politik) maka daerah-daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan memiliki keunggulan kualitatif, komparatif, dan kompetitif untuk meningkatkan potensi pendapatan daerahnya [4].

Sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah berasal dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dimana PAD merupakan proporsi terbesar dengan kontribusi lebih dari 50% setiap tahun. Meskipun demikian, capaian pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 2% dibandingkan tahun 2019. Capaian Total Pendapatan Daerah 2017-2020 berdasarkan LPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 digambarkan pada grafik tren sebagai berikut:

Grafik 1. Tren Capaian Total Pendapatan Daerah 2017-2020 (dalam Milyar Rupiah)

Penurunan pendapatan daerah tersebut merupakan dampak ekonomi secara luas akibat bencana pandemi Covid-19 di Indonesia yang tidak hanya berimbas pada perekonomian melainkan pada seluruh sektor kehidupan lain seperti efek bola salju (snowball). Bahkan berdasarkan data per September 2020, selama pandemi Covid-19 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 4,12 juta jiwa (11,84%) atau meningkat dibandingkan Maret 2020 (11,41%). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 juga mengalami kontraksi yang sangat tajam yakni sebesar -2,65% atau lebih tinggi dibandingkan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu -2,07 [5].

Dampak dari pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah membutuhkan upaya perbaikan (recovery) beberapa tahun ke depan. Dalam rangka menggalakan iklim investasi di Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah menyederhanakan birokrasi perijinan, meningkatkan infrastruktur, serta ketersediaan lahan yang luas untuk meraih target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pasca pandemi Covid-19. Peningkatan investasi diharapkan berdampak pada peningkatan pajak yang dikenakan kepada investor. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ririn, Prihatni, dan Murdayanti yang menunjukkan bahwa investasi dapat meningkatkan pajak, pembangunan daerah, serta kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga dapat berkontribusi besar terhadap perolehan PAD [6]. Akan tetapi, penelitian Wadjauje, Susanti, dan Pahala menunjukkan hasil yang berbeda, dimana tingginya tarif pajak atas investasi di Provinsi DKI Jakarta menjadi pertimbangan yang cenderung memberatkan investor menanamkan modalnya di sehingga investasi tidak berpengaruh pada penerimaan PAD [2].

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditargetkan untuk pemulihan pasca wabah Covid-19 dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan UMKM. Sektor pariwisata turut memberikan kontribusi besar terhadap PAD melalui biaya retribusi mulai dari tiket masuk, parkir, hingga biaya akomodasi seperti makan dan penginapan. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan pajak serta retribusi parkir, hotel, restoran, dan hiburan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wadjauje, Susanti, dan Pahala yang menunjukkan hasil bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif secara signifikan terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta [2]. Namun dalam penelitian Purwanti dan Dewi menunjukkan hasil bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap PAD akan tetapi secara tidak langsung signifikan melalui penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran [7]. Belanja modal diduga memiliki keterkaitan dengan PAD dimana belanja modal yang digunakan secara tepat dan efisien dapat berkontribusi secara riil terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik terutama menyangkut 6 (enam) bidang pelayanan dasar sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial [8]. Dengan demikian, masyarakat akan merasa puas dan terdorong disiplin membayar pajak dan retribusi atas penggunaan fasilitas publik tersebut sehingga meningkatkan PAD. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wadjauje, Susanti, dan Pahala yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap PAD [2]. Akan tetapi, penelitian Ririn, Prihatni, dan Murdayanti menunjukkan bahwa meskipun suatu daerah melakukan belanja modal yang besar tanpa pengelolaan dan pengawasan yang ketat akan menimbulkan risiko penyimpangan sehingga belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD [6].

Penelitian ini melihat PAD sebagai indikator kemandirian ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari segi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Dari perspektif sumber pendapatan, faktor investasi dan jumlah wisatawan ditentukan berdasarkan potensi ekonomi dan pariwisata berupa proyek strategis unggulan yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dari perspektif pengeluaran, belanja modal untuk peningkatan kualitas sarana prasarana publik akan mendorong peningkatan PAD karena dapat meningkatkan loyalitas masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta

adanya inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, jumlah wisatawan, dan belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2020.

II. METODE DAN MATERI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan cara membuat gambaran yang sistematis dan faktual mengenai hubungan fenomena-fenomena dari kelompok tertentu [9]. Sampel dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Teknik sampling menggunakan *non probability sampling*, yaitu *purposive sampling* dengan kriteria: Kabupaten/Kota yang memiliki publikasi data laporan penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah selama tahun 2017-2020. Hasil sampling menunjukkan seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi kriteria sampel yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi PMA dan PMDN, serta kunjungan wisatawan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Yang dipublikasikan secara *online* pada beberapa sumber antara lain melalui *website* <https://ppid.jatengprov.go.id> [10]; <https://jateng.bps.go.id> [11]; dan <https://www.kemenkeu.go.id> [12].

Kerangka teoritis ditentukan berdasarkan beberapa literatur penelitian terdahulu. Investasi ditentukan berdasarkan jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan penelitian Kurniawan, Militina, dan Suharto [13] Widjauje, Susanti, dan Pahala [2] dan Yanti, Fadliyanti, dan Manan [14]. Jumlah wisatawan diukur berdasarkan data dari BPS dan Kementerian Pariwisata sesuai dengan penelitian Widjauje, Susanti, Pahala [2] dan Lusiana et, al. [15]. Nilai Belanja Modal (BMO) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi APBD sesuai dengan penelitian Muda, Ismail, dan Marhayanie [16], Widjauje, Susanti, dan Pahala [2] dan Kurniawan, Militina, dan Suharto [13].

Penelitian ini berasumsi terdapat pengaruh secara langsung dari variabel independen (INV, JWS, BMO) terhadap variabel dependen (PAD), sehingga penelitian mengenai pengaruh Investasi (INV), Jumlah Wisatawan (JWS), dan Belanja Modal (BMO) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2020 dapat diilustrasikan dalam konseptual model analisis regresi linier berganda seperti pada Gambar 1. dibawah ini:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dengan demikian, hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD

H₂ : Jumlah Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD

H₃ : Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD

Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel, yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data diolah menggunakan *software* Eviews 12. Model Persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \alpha_i + \beta_1 INV_{it} + \beta_2 JWS_{it} + \beta_3 BMO_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

PAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

α : konstanta

β : koefisien regresi

INV : Total Investasi PMDN + PMA

JWS : Jumlah Wisatawan Lokal + Mancanegara

BMO : Realisasi Belanja Modal

E : error term

I : Kabupaten/Kota

t : waktu

Metode analisis data meliputi: analisis deskriptif, penentuan model estimasi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Data penelitian diubah dalam model estimasi, yaitu: *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) kemudian dipilih 1 (satu) model yang paling baik (fit) untuk regresi data panel. Metode pemilihan model estimasi dilakukan dengan Uji Chow (memilih CEM atau FEM); Uji Hausman (memilih FEM atau REM); dan Uji Lagrange Multiplier (memilih CEM atau REM). Menurut Ghazali, uji autokorelasi hanya digunakan pada data *time series* dan tidak digunakan pada data *cross section* dan panel [17]. Tahap akhir adalah uji hipotesis dengan uji-F (simultan) dan Uji-t (parsial).

III. PEMBAHASA DAN HASIL

Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata Investasi (INV) yang bersumber dari PMDN maupun PMA pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 200.734.705.486,00 selama tahun 2017-2020. Investasi paling tinggi sebesar Rp 16.418.994.799.144,00 terjadi pada tahun 2017 di Pemerintah Kota Magelang, sedangkan investasi paling rendah sebesar Rp 1.688.506.082,00 terjadi pada tahun 2017 di Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Nilai rata-rata Jumlah Wisatawan (JWS) selama tahun 2017-2020 yang berkunjung ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.228.168 yang merupakan wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jumlah wisatawan paling banyak adalah 7.232.342 wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang pada tahun 2019, sedangkan jumlah wisatawan paling sedikit adalah 23.938 wisatawan yang berkunjung ke Kota Salatiga pada tahun 2020. Nilai rata-rata realisasi Belanja Modal (BMO) Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 351.136.193.211,00 selama tahun 2017-2020. Pemerintah Kabupaten/Kota yang paling besar merealisasikan belanja modal adalah Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 1.275.360.500.418,00 pada tahun 2017, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang paling kecil merealisasikan belanja modal adalah Pemerintah Kota Tegal sebesar Rp 113.622.796.896,00 pada tahun 2018. Berikut hasil analisis deskriptif:

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INV	140	1.688.506.082	16.418.994.799.144	200.734.705.486	1.993.898.050.554
JWS	140	23.938	7.232.342	1.228.168	1.266.862
BMO	140	113.622.796.896	1.275.360.500.418	351.136.193.211	178.469.389.882
PAD	140	179.223.595.476	2.516.650.583.906	356.539.189.774	305.111.857.731
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji Chow diperoleh nilai probabilitas *Cross-section Chi-Square* adalah $0,0000 < 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa model estimasi FEM lebih baik dari model CEM untuk mengestimasi model. Hasil Uji Chow dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.760454	(34,102)	0.0000

DOI: 10.52362/jisamar.v6i4.949

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH		d.f.	Prob.
F-statistic	3.597640	Prob. F(1,137)	0.0600
Obs*R-squared	3.556759	Prob. Chi-Square(1)	0.0593

Sumber: Data diolah, 2022

Pengujian hipotesis tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan data yang dihasilkan dari pendekatan Fixed Effect Model (FEM) sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.21536	1.521275	14.60312	0.0000
INV	-0.012077	0.009213	-1.310902	0.1928
JWS	-1.65E-08	1.62E-08	-1.017247	0.3114
BMO	0.177507	0.056021	3.168581	0.0020

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.096467	R-squared	0.942781
Mean dependent var	26.59971	Adjusted R-Squared	0.922025
S.D. dependent var	0.404728	S.E. of regression	0.113016
Akaike info criterion	-1.296384	Sum squared resid	1.302811
Schwarz criterion	-0.497938	Log likelihood	128.7469
Hannan-Quinn criter	-0.971919	F-statistic	45.42225
Durbin-Watson stat	2.033077	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 6. diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) sebesar 0,922025. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel independen Investasi (INV), Jumlah Wisatawan (JWS), dan Belanja Modal (BMO) sebesar 92,2% dan sisanya sebesar 7,8% dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model. Hasil uji F (simultan) adalah $0,000 < 0,05$. Nilai F-statistic $> F$ table ($45,42225 > 2,67$) sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen Investasi (INV), Jumlah Wisatawan (JWS), dan Belanja Modal (BMO) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji t di atas, H_1 menunjukkan nilai probabilitas INV sebesar $0,1928 > 0,05$ dan dalam tabel diketahui nilai t-statistic $< t$ -table ($-1,310902 < 1,6561$). Artinya Investasi (INV) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Rosmalia, Rusdiah, dan Fitriadi [19], Kurniawan, Militina, dan Suharto [13], Yanti, Fadliyanti, dan Manan [14] yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara investasi dengan PAD karena data realisasi investasi selama periode pengamatan berfluktuasi dan tidak berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga investasi tidak berkontribusi besar bagi PAD. Penelitian tersebut melihat pengaruh investasi secara parsial terhadap PDRB yang menganggap adanya linieritas peningkatan PDRB dengan peningkatan penerimaan pajak daerah sebagai komponen terbesar PAD. Hasil penelitian Wadjaudje, Susanti, dan Pahala [2] juga menemukan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan pada PAD disebabkan karena tingginya tarif pajak yang dikenakan kepada investor dalam negeri (30%) lebih besar daripada tarif pajak yang dikenakan kepada investor luar negeri (18%) sehingga hal ini menjadi pertimbangan khusus yang mengurani minat investor dalam negeri untuk menanamkan modal di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar yang menyatakan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dengan pendapatan daerah karena dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan perkapita [13]. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya untuk mengembangkan kawasan strategis terutama pada sektor industri dan pariwisata, mendorong kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta mengefisiensikan proses

DOI: 10.52362/jisamar.v6i4.949

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

perijinan investor agar semakin jelas, mudah, dan cepat. Pada penelitian ini, rata-rata investasi dari PMDN maupun PMA Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi dan menunjukkan tren penurunan yang tajam pada tahun 2020 imbas dari terjadinya pandemi Covid-19. Dengan asumsi total investasi yang diterima daerah akan mempengaruhi penerimaan pajak/retribusi daerah, maka variabel investasi (INV) dalam penelitian ini tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Hasil uji H_2 menunjukkan nilai probabilitas JWS sebesar $0,3114 > 0,05$ dengan $t\text{-statistic} < t\text{-table}$ ($-1,017247 < 1,6561$) yang berarti Jumlah Wisatawan (JWS) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Widyaningsih dan Budhi [20] serta Wijaya dan Sudiana [21] yang menyatakan bahwa kunjungan wisatawan berpengaruh tidak signifikan secara langsung terhadap PAD, akan tetapi dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap PAD dengan variabel mediasi pajak restoran, pajak hotel dan retribusi obyek wisata. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD, seperti penelitian Wadjaudje, Susanti, dan Pahala [2] dan Lusiana et, al. [15] yang menyatakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah akan membayar tiket wisata dan turut mengunjungi pusat perbelanjaan untuk membeli ciri khas daerah. Selain itu wisatawan mancanegara selama berwisata akan menggunakan jasa transportasi untuk mobilitas dan/atau penginapan, sehingga jumlah wisatawan akan meningkatkan perekonomian dan penerimaan PAD. Hal ini disebabkan karena penelitian ini memasukkan data jumlah kunjungan wisata tahun 2020 dimana jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya tren penurunan yang sangat signifikan. Awal tahun 2020 merupakan tahun terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemberlakuan aturan pembatasan aktivitas masyarakat (*lock down*), sehingga masyarakat dihimbau untuk melakukan aktivitas dari rumah dan dilarang bepergian ke luar daerah tempat tinggal. Hal ini menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan selama tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan di daerah mempengaruhi penerimaan pajak/retribusi daerah, sehingga dalam penelitian ini variabel Jumlah Wisatawan (JWS) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Hasil pengujian H_3 menunjukkan nilai probabilitas BMO sebesar $0,0020 < 0,05$ dengan $t\text{-statistic} < t\text{-table}$ ($3,168581 > 1,6561$) yang berarti Belanja Modal (BMO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Muda, Ismail, dan Marhayanie [16] dan Doni, F. [22] yang menyatakan bahwa belanja modal dapat dinilai sebagai investasi untuk penguatan ekonomi di masa depan karena peningkatan fasilitas sarana dan prasarana mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kurniawan, Militina, Suharto [13] dan Wadjaudje, Susanti, dan Pahala [2] menyatakan bahwa belanja modal untuk peningkatan kualitas sarana prasarana dan kesejahteraan masyarakat akan membuat masyarakat nyaman dan semakin produktif, sehingga masyarakat akan semakin loyal dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Akan tetapi, Kara, Tas, dan Ada [23] menemukan bahwa di Turki, tidak semua belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah tetapi tergantung pada masing-masing tipe daerah (maju atau tertinggal) yang mana untuk daerah maju maka belanja kategori infrastruktur sosial untuk produktivitas tenaga kerja seperti pendidikan dan kesehatan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pajak daerah sedangkan pada daerah tertinggal, belanja modal kategori infrastruktur ekonomi seperti jalan raya, pembangkit listrik, fasilitas air, transportasi untuk peningkatan produksi lebih berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Ririn, Prihatni, Murdayanti [6] yang menyatakan bahwa belanja modal yang besar tanpa pengelolaan dan pengawasan yang ketat, maka akan timbul indikasi penyimpangan (*fraud*) sehingga belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dan bahkan dapat merugikan keuangan negara. Berdasarkan hasil pengamatan, realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2017-2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur sosial-ekonomi.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Investasi tidak berkontribusi terhadap PAD disebabkan karena terbatasnya pilihan investasi yang ditawarkan pemerintah kabupaten/kota, kerumitan administrasi dan perijinan, investasi yang tidak merata antar daerah, serta kurangnya gairah investasi akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan rendahnya

DOI: 10.52362/jisamar.v6i4.949

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

pendapatan pajak dan retribusi daerah. Jumlah pengunjung yang mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2020 akibat pemberlakuan aturan pembatasan aktivitas masyarakat (*lock down*) diduga menyebabkan rendahnya pendapatan pajak dan retribusi daerah sehingga jumlah wisatawan tidak berkontribusi positif dan signifikan pada PAD. Investasi (PMDN dan PMA) serta jumlah wisatawan (lokal dan mancanegara) merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan potensi ekonomi dan proyek strategis sektor pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan belanja modal terbukti secara empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Belanja modal pemerintah daerah yang tepat sasaran untuk peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur sosial dan ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi lebih nyaman dan semakin produktif. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin loyal dan taat membayar pajak serta retribusi daerah atas fasilitas yang diterimanya. Dengan demikian, PAD akan meningkat seiring dengan belanja modal yang tepat sasaran. Meskipun demikian, peningkatan alokasi belanja modal sebaiknya harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.

Penelitian ini memasukkan data investasi, jumlah wisatawan, dan realisasi APBD tahun 2020 yang mengandung faktor eksternalitas, yaitu lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19 sehingga kinerja sektor-sektor ekonomi daerah sebagai sumber penerimaan PAD mengalami penurunan yang signifikan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup dengan melihat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi PAD. Saran untuk seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah agar terus berinovasi dalam rangka memenuhi target pemulihan ekonomi (*recovery*) akibat pandemi Covid-19, terutama pada sektor-sektor yang berkontribusi besar bagi peningkatan PAD serta mengoptimalkan mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja modal agar berguna dan tepat sasaran untuk peningkatan PAD.

REFERENSI

- [1] A. Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, 4th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- [2] D. . Wadjudje, S. Susanti, and I. Pahala, "Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta," *JE KP*, vol. 5, no. 2, pp. 105–128, 2018.
- [3] Y. N. Nugraha, "Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia," 2019. [Online]. Available: <https://accounting.binus.ac.id/2019/02/25/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>
- [4] PPID Provinsi Jawa Tengah, "Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021," Semarang, 2022.
- [5] PPID Provinsi Jawa Tengah, "Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020," Semarang, 2021.
- [6] T. Ririn, R. Prihatni, and Y. Murdayanti, "Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *J. Ilm. Wahana Akunt.*, vol. 9, no. 1, 2014.
- [7] N. D. Purwanti and R. M. Dewi, "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013," *J. Ilm.*, pp. 1–12, 2014.
- [8] P. R. Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal," Jakarta, 2018.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- [10] P. Provinsi Jawa Tengah, "Web PPID Provinsi Jawa Tengah." <https://ppid.jatengprov.go.id>
- [11] Badan Pusat Statistik Jateng, "Web BPS." <https://jateng.bps.go.id>

DOI: 10.52362/jisamar.v6i4.949

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [12] Kementerian Keuangan RI, “Web Kemenkeu.” <https://www.kemenkeu.go.id>
- [13] A. I. Kurniawan, T. Militina, and R. B. Suharto, “Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi,” *INOVASI*, vol. 13, no. 2, pp. 68–77, 2017.
- [14] S. Yanti, L. Fadliyanti, and A. Manan, “Pengaruh Belanja Modal, Investasi PMDN Dan Investasi PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB,” *EKONOBIS*, vol. 7, no. 1, pp. 18–39, 2021.
- [15] Lusiana, M. Neldi, S. Sanjaya, and Zefriyenni, “The Effect of Number of Visitors , Tourist Destinations , Hotel Room Tax and Accommodations on Original Local Government Revenue : Case Study West Sumatra Province , Indonesia,” *Int. J. Financ. Res.*, vol. 12, no. 3, 2021, doi: 10.5430/ijfr.v12n3p230.
- [16] I. Muda, M. Ismail, and Marhayanie, “Impact of Capital Expenditure Allocation on the Local Government Assets and the Role of Revenue Sustainability : Evidence from North Sumatra Iskandar MUDA * Mutia ISMAIL Marhayanie MARHAYANIE,” *Int. J. Econ. Perspect.*, vol. 11, no. 2, pp. 110–123, 2017.
- [17] I. Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Vol. 8)*. Semarang: Badan Penelitian Universitas Diponegoro, 2016.
- [18] N. D. Gujarati, *Dasar-Dasar Ekonometrika (Vol. 5)*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- [19] J. Rosmalia, R. Iskandar, and Fitriadi, “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan,” *Ekon. Bisnis*, vol. 5, no. 2, pp. 159–172, 2014.
- [20] P. Widyaningsih and M. K. S. Budhi, “Pengaruh Kunjungan Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah,” *E-Jurnal EP Unud*, vol. 3, no. 4, pp. 155–163, 2014.
- [21] B. A. B. Wijaya, I and I. K. Sudiana, “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015,” *E-Jurnal Ekon. Pembang. Univ. Udayana*, vol. 5, no. 12, pp. 1384–1407, 2016.
- [22] F. U. Doni, “Analysis of Influencing Factors Regional Original Revenue (PAD) in The Provincial Government of Dki Jakarta,” *Indones. J. Business, Account. Manag.*, vol. 1, no. 1, pp. 25–30, 2018, doi: 10.36406/ijbam.v1i1.220.
- [23] M. A. Kara, S. Taş, and S. Ada, “The Impact of Infrastructure Expenditure Types on Regional Income in Turkey,” *Reg. Stud.*, vol. 50, no. 9, pp. 1509–1519, 2016, doi: 10.1080/00343404.2015.1041369.